

## KEOLAHRAGAAN

2023

PERDA NOMOR 3 LD 2023/NO141 TLD NO.5 ,87 HLM

PERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah.
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU NO.5 5 Tahun 1960);UUNO.8 Tahun 1981;UU No. 18 Tahun 1999; UU NO. 10 Tahun 2001 ;UU No. 28 Tahun 2002; UU NO. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU no. 26 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008); UU no. 22 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU no. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU no. 12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP no. 27 Tahun 1999; PP No. 29 Tahun 2000: PP No. 36 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 34 Tahun 2006 ; PP No. 38 Tahun 2007 ; PP No. 15 Tahun 2010 ; PP No. 61 Tahun 2010 ; PP No. 38 Tahun 2011; Kepmen PU.No. : 10/KPTS/2000 Permen Pu No. : 29/PRT/M/2006 ; Permen PU No. : 30/PRT/M/2006 ; Permendagri No. 1 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Permen PU No. : 24/PRT/M/2007; Permen PU No.: 25/PRT/M/2007; Permen Pu No. : 26/PRT/M/2007 ; Permen PU No. 5/PRT/M/2008 ; Permen PU No. : 24/PRT/M/2008; Permen PU No. : 26/PRT/M/2008 Permen PU No. : 16/PRT/M/2010 ; Permen pu No. : 17/PRT/M/2010 ; Peremndagri No. 32 Tahun 2010 ; Permendagri No. 53 Tahun 2011 ; Perda Kota Tasikmalaya No. 29 Tahun 2003 ; Perda Kota Tasikmalaya No.6 Tahun 2005 ; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2008 ;Perda Kota Tasikmalaya No. Nomor 8 Tahun 2008 ;Perda Kota Tasikmalaya No. 11 Tahun 2009 ; Perda Kota Tasikmalaya No. 3 Tahun 2012 ; Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012 ; Perda Kota Tasikmalaya No. 7 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah ini Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut: Asas Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Prasarana Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Pendataan Bangunan Gedung; Tim Ahli Bangunan Gedung; Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung;Peran Masyarakat; Pembinaan; Sanksi Administratif;Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Mei 2013
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap Bangunan Gedung di Daerah yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan 70 halaman.

